



**EVALUASI HASIL IMPLEMENTASI
THE COORDINATED MEKONG MINISTERIAL INITIATIVE AGAINST
TRAFFICKING SUB-REGIONAL PLAN OF ACTION (COMMIT SPA)
DALAM MENANGANI HUMAN TRAFFICKING DI THAILAND
PERIODE 2011-2013**

Isti Nur Rahmahwati

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

Abstract

Thailand, Laos, Myanmar, China, Vietnam, and Cambodia created COMMIT and COMMIT SPA. During COMMIT SPA implementation period 2011-2013, the number of human trafficking increased in Thailand. Most of human trafficking victims in Thailand are exploited into sexual exploitation and forced labor. The study aims to analyze causes of human trafficking increased during COMMIT SPA implementation. The study result is the increase of human trafficking is caused by Thailand's interests by using sex trafficking victims in prostitution and sex tourism activities as a draw for foreign tourists to Thailand and labor trafficking victims in producing prawns for supermarkets in US and European countries to get economic benefits.

Keywords: *human trafficking, international cooperation, international regime*

1. Pendahuluan

Thailand merupakan negara yang dijadikan sebagai negara transit dan tujuan utama bagi korban *human trafficking* di kawasan GMS (AFPPD: 31) dengan berbagai bentuk eksploitasi *human trafficking* (IOM, 2011: 31). Sebagai negara tujuan utama migrasi tenaga kerja paling signifikan di kawasan GMS (Larsen, 2010: 2), Thailand dimanfaatkan sebagai pusat migrasi ilegal di kawasan GMS (Hugoo, 2005: 24). Berdasarkan laporan *Walk Free Foundation*¹ dalam “*The Global Slavery Index 2013*”, Thailand termasuk ke dalam kategori sepuluh negara dengan tingkat perbudakan orang tertinggi di dunia dengan estimasi populasi perbudakan modern berjumlah 472,811 orang (Walk Free Foundation, 2013: 7).

¹ *Walk Free Foundation* adalah organisasi non pemerintah yang memiliki tujuan untuk mengakhiri segala bentuk perbudakan modern diantaranya adalah perbudakan, eksploitasi anak, pernikahan paksa, *human trafficking*, dan kerja paksa.

Pada tahun 2004, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Cina membentuk kerjasama multilateral *The Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking* (COMMIT). Upaya penanggulangan *human trafficking* dirumuskan melalui konsultasi dengan COMMIT *Task Forces*, PBB, NGO, lembaga donatur dan direalisasikan ke dalam COMMIT *Sub-Regional Plan of Action* (COMMIT SPA) di bawah kerangka dokumen MoU COMMIT 2004 (UNIAP, 2007: 5).

Pada masa implementasi COMMIT SPA periode 2011-2013, *human trafficking* di Thailand mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 terdapat 83 kasus *human trafficking* yang dilaporkan oleh *Royal Thai Police* (RTP) melalui *Office of Anti-Trafficking in Persons Committee* (OATPC), *Ministry of Social Development and Human Security* (MSDHS) (OATPC, 2011: 7). Eksploitasi seksual melalui prostitusi dengan jumlah 67 kasus adalah tujuan utama *human trafficking* di Thailand dan diikuti dengan eksploitasi tenaga kerja dengan jumlah 13 kasus (OATPC, 2011: 7). Pada tahun 2012, kasus *human trafficking* mengalami peningkatan dari 83 kasus menjadi 307 kasus (OATPC, 2012: 3). Kemudian, pada tahun 2013, kasus *human trafficking* di Thailand mengalami peningkatan dengan jumlah 674 kasus (OATPC, 2013: 6).

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas adalah mengapa *human trafficking* meningkat pada masa implementasi COMMIT SPA di Thailand periode 2011-2013? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan situasi *human trafficking* di Thailand periode 2011-2013 dan menganalisa penyebab peningkatan *human trafficking* pada masa implementasi COMMIT SPA di Thailand periode 2011-2013. Teori yang digunakan adalah kejahatan transnasional, kerjasama internasional, dan rezim internasional dengan menggunakan paradigma neo-liberalisme yang merupakan bagian dari teori hubungan internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui *snowball sampling*, wawancara, dan studi pustaka.

2. Pembahasan

2.1 Implementasi COMMIT SPA Periode 2011-2013 di Thailand

Kerjasama COMMIT dibentuk oleh Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, Laos, dan Cina melalui penandatanganan COMMIT MoU pada bulan Oktober 2004 di Yangon, Myanmar (UNIAP, 2014: 4). Dalam penyelenggaraan kerjasama COMMIT, negara-negara anggota COMMIT membentuk COMMIT SPA pada tahun 2005. COMMIT SPA yang menjadi fokus penelitian ini adalah COMMIT SPA III periode 2011-2013 yang mencakup 5 lingkup aktivitas. Ruang lingkup tersebut menggantikan PPC yang terdapat pada COMMIT SPA I dan II yaitu (UNIAP, 2011: 5):

1. Area 1 - *Policy and Cooperation*
2. Area 2 - *Legal Frameworks, Law Enforcement and Justice*
3. Area 3 - *Protection, Recovery, and Reintegration*
4. Area 4 - *Preventive Measures and Vulnerability Reduction*
5. Area 5 - *Monitoring, Evaluation, and Anti-Human Trafficking Data System*

Dalam mengimplementasikan aktivitas-aktivitas dalam 5 Area COMMIT SPA selama periode 2011-2013, Thailand menyelenggarakan beberapa kegiatan baik tingkat nasional, transnasional, maupun regional. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah *training workshop* COMMIT dan *working group*, pelatihan bagi pegawai imigrasi, pertemuan multilateral dengan negara-negara COMMIT maupun negara diluar kawasan GMS, penelitian lintas batas kawasan GMS, pengembangan “*a new behaviour change*

focused tool” terkait *re-thinking prevention*² pada kasus human trafficking (UNIAP, 2011: 33), dan mengeluarkan *Thailand’s Anti-Human Trafficking Action Plan 2012-2013*.

Lebih lanjut, Thailand mengembangkan kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga Thailand di kawasan GMS, mengadakan kampanye *anti-human trafficking*, mengadakan pertemuan dan konsultasi laporan SIREN terkait pengalaman korban warga negara asing dalam proses penuntutan kasus *human trafficking* di Thailand (UNIAP, 2014: 47), menyelenggarakan pertemuan SOM dan IMM, mengembangkan layanan konseling bagi migran, meratifikasi UNTOC pada 16 November 2013 (OATPC, 2013: 11), mengembangkan *One Stop Crisis Center* (OSCC) (OATPC, 2013: 60), menjalin kerjasama dengan *private sectors* dibidang pariwisata dan industri perikanan, dan mengembangkan *database system* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *human trafficking* di Thailand (OATPC, 2013: 61).

2.2 Penyebab Peningkatan *Human Trafficking* Pada Masa Implementasi COMMIT SPA

2.2.1 Sektor Pariwisata

Sektor pariwisata menghasilkan kontribusi GDP Thailand lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya seperti sektor keuangan, pendidikan, bank, komunikasi, dan pendidikan tinggi (WTTC, 2013: 9). Kontribusi sektor pariwisata terhadap GDP Thailand meningkat sekitar 7% menjadi 9% dari tahun 2011 hingga tahun 2013 (WTTC, 2014: 8). Industri pariwisata khususnya industri hiburan telah menarik banyak wisatawan asing untuk datang ke Thailand. Industri hiburan Thailand tidak hanya menyediakan penampilan kebudayaan. Di tempat-tempat hiburan tertentu khususnya tempat hiburan malam, pelayanan khusus seperti *sex tourism* juga diberikan meskipun tindakan ini telah dilarang pemerintah. Tempat-tempat tersebut sangat rawan terhadap ancaman *sex trafficking*. Korban *human trafficking* di eksploitasi untuk menjadi pekerja seks di tempat-tempat tersebut. Mereka tidak hanya melayani kebutuhan seks tetapi juga memberikan ‘*sexual attraction*’ kepada para wisatawan.

2.2.1.1 Perkembangan Prostitusi dan *Sex Tourism*

Prostitusi merupakan tindakan ilegal di Thailand sejak tahun 1990, termasuk *sex work in private*, *soliciting*, dan *brothels* (UNDP, 2012: 155). Prostitusi dan *sex tourism* telah lama menjadi bagian dari industri pariwisata di Thailand. Sejak abad ke-20, *sex tourism* muncul sebagai bagian dari industri perdagangan seks yang memberikan keuntungan ekonomi bagi negara tujuan (Mason, 2011: 52). Ashley Mason, “*Tourism and the Sex Trade in Southeast Asia*”, dalam Jurnal Antropologi, Universitas Western Ontario, menunjukkan bahwa jumlah tempat-tempat prostitusi seperti klub malam, bar, dan *brothel* mulai berkembang di Bangkok dan wilayah bagian utara Thailand (Mason, 2011: 52). Sejak kedatangan tentara AS ke Thailand, jumlah turis domestik dan mancanegara yang datang ke Thailand mengalami peningkatan. Pada tahun 1960 jumlah wisatawan sekitar 200.000 orang dan meningkat pada tahun 1970 sekitar 800.000 orang (Brodeur, N. Lekfuangfu, Zylberberg, 2014: 8). Kemudian jumlah ini meningkat pesat pada tahun 1980 sebanyak dua juta wisatawan (Brodeur, N. Lekfuangfu, Zylberberg, 2014: 8).

Prostitusi dan *sex tourism* terus ada hingga abad ke-21 dan telah menjadi bagian dari perkembangan industri pariwisata dalam beberapa tahun terakhir (Tanielian, 2013: 100). Pendiri salah satu organisasi pekerja seksual Thailand (*Empower Foundation*³),

² Pencegahan terjadinya kembali *human trafficking*.

³ *Empower Foundation* adalah salah satu dari organisasi pekerja seksual di Thailand. Organisasi ini membantu para pekerja seks dan mantan pekerja seks untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan lain

Chantawipa Apisuk, menyatakan bahwa prostitusi di Thailand masih berkembang meskipun dianggap ilegal dan dilarang oleh undang-undang (washingtontimes.com, 2014). Lebih lanjut, dibandingkan dengan negara lain di Asia, Thailand adalah negara yang aman bagi berkembangnya prostitusi (washingtontimes.com, 2014). Perkembangan ini tidak terlepas dari pengaruh prostitusi dan *sex tourism* yang berkembang pada masa kedatangan tentara AS ke Thailand selama perang Vietnam berlangsung.

Diperkirakan terdapat lebih dari 7.222 tempat hiburan di Thailand (Foundation Scelles, 2011: 287) dimana prostitusi dan *sex tourism* berkembang. Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Koh Samui, dan Phuket merupakan kawasan-kawasan pusat dimana prostitusi dan *sex tourism* berkembang di Thailand (Foundation Scelles, 2011: 286). Manajer Regional UNIAP, Matthew Friedman, memperkirakan bahwa terdapat sekitar 27.000 pekerja seks termasuk korban *human trafficking* di tempat-tempat hiburan malam di kawasan Pattaya (wgbhnews.org, 2013). Berbagai macam tempat hiburan seperti bar, tempat karaoke, *massage parlor*, *club*, maupun hotel dapat memberikan pelayanan khusus bagi wisatawan yang ingin memenuhi kebutuhan seksualnya (Foundation Scelles, 2011: 287; ECPAT Internasional, 2011: 9).

Sebagian besar korban *sex trafficking* yang diperdagangkan untuk tujuan prostitusi dan *sex tourism* merupakan wanita dan anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun. Pada tahun 2011, terdapat 108 anak perempuan yang menjadi korban *sex trafficking* untuk tujuan prostitusi di Thailand (OATPC, 2011: 9). Lebih lanjut, sebanyak 52 orang wanita dan anak perempuan asal Thailand dikirim ke luar negeri untuk tujuan eksploitasi seksual melalui *human trafficking* pada periode 2011-2012 (OATPC, 2011: 10-11). Jumlah ini meningkat seiring dengan peningkatan jumlah korban *human trafficking* di Thailand pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1020 korban dimana kasus *sex trafficking* paling banyak melibatkan perekrutan korban dengan jumlah 520 kasus dari 674 kasus (OATPC, 2013: 3).

Wisatawan seks dalam jumlah besar terutama yang berasal dari mancanegara dapat mengakibatkan *sex tourism* dan prostitusi terus berkembang di Thailand (ECPAT Internasional, 2011: 9). Perkembangan ini juga didukung oleh kemajuan teknologi yang memfasilitasi produksi dan penyebaran pornografi melalui internet (ECPAT Internasional, 2011: 9). Laporan investigasi Philip Martin dalam "*Human Trafficking: One Town in Thailand*", mengutip pernyataan Matthew Friedman bahwa, "*the mafia is very much involved, the Russian mafia*" (wgbhnews.org, 2013). Keterlibatan mafia dalam sindikat *human trafficking* akan menciptakan dan memperkuat kerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perekrutan korban *human trafficking*. Keberadaan sindikat *human trafficking* ini juga akan mempersulit aparat penegak hukum Thailand untuk melakukan investigasi dan identifikasi pelaku kejahatan dari kelompok-kelompok terorganisir.

2.2.2 Sektor Perikanan

ILO mengkategorikan Thailand sebagai salah satu negara industri *seafood* dan ikan terbesar di dunia dengan kontribusi 4% dari jumlah ekspor produk Thailand (ILO, 2012: 1). Industri *seafood* dan ikan Thailand menghasilkan nilai ekspor lebih dari 5,1 miliar dolar AS (ILO, 2012: 1). Melalui industri ini, Thailand menghasilkan rata-rata satu juta ton ikan dan *seafood* setiap tahun (ILO, 2012: 1).

2.2.2.1 Permintaan Irregular Low-Skilled Migrant

Kesenjangan pendapatan (*income disparity*) Thailand dengan Myanmar, Kamboja, Laos) telah menciptakan arus migrasi tenaga kerja terutama bagi *low-skilled worker* (Pholphirul, 2012: 3). Pekerja migran tidak hanya memberikan kontribusi bagi GDP

yang lebih bermanfaat, dan memperjuangkan hak asasi para pekerja seks dengan melegalkan prostitusi sebagai pekerjaan yang setara dengan jenis pekerjaan lainnya.

Thailand tetapi juga bagi perusahaan untuk membuat lebih banyak investasi dan meningkatkan daya saing (Pholphirul, 2012: 3). *Environmental Justice Foundation* (EJF)⁴ melakukan investigasi bahwa mekanisme yang telah dibentuk belum dapat mengatur pergerakan para pekerja migran dan memonitor mereka yang menghadapi kekerasan dan eksploitasi khususnya di industri perikanan Thailand (EJF, 2014: 19). Sistem perizinan kerja yang mahal dan kompleks juga memberikan peluang bagi *broker* dan agen untuk melakukan rekrutmen dan manajemen migrasi tenaga kerja melalui jalur iregular (EJF, 2013: 16). Permintaan pekerja migran iregular juga dipengaruhi oleh pesanan produk ikan dan *seafood* terutama udang oleh negara-negara barat khususnya Eropa dan AS (Humanity United, 2013: 6). Diperkirakan sebanyak 700.000 orang bekerja di industri perikanan Thailand dimana 90% adalah migran yang berasal dari Myanmar, Kamboja, dan Laos (Humanity United, 2013: 28; EJF, 2013: 12).

2.2.2.2 Permintaan Impor Udang Thailand

Thailand merupakan eksportir udang terbesar dimana AS merupakan negara importir utama dengan estimasi 13% dari jumlah ekspor ikan Thailand (EJF, 2013: 8; ILO, 2012: 1). Udang yang diekspor berasal dari 15 pelabuhan sepanjang Teluk Thailand dimana Samut Sakhon adalah kawasan terbesar dengan 31,5% proses produksi udang (Humanity United, 2013: 29; UNIAP, 2011: 10). Investigasi EJF mengungkapkan bahwa industri udang di Thailand mempunyai “*a hidden cost*” yang melibatkan *labor trafficking* dan eksploitasi migran (EJF, 2013: 8). Melalui wawancara yang dilakukan pada tahun 2012 dan 2013, EJF menemukan bahwa ekspor ikan yang diproduksi ke AS, Eropa, maupun Jepang oleh beberapa perusahaan besar Thailand melibatkan unsur kekerasan, penyiksaan, dan eksploitasi pekerja migran khususnya dalam *peeling sheeds*⁵ pada tahap *pre-processing of production* (EJF, 2013: 8).

The Guardian, dalam laporan investigasinya, menggambarkan mekanisme keterlibatan korban *labor trafficking* dalam aktivitas produksi udang yang akan diekspor ke supermarket di Eropa. Mekanisme ini dibagi ke dalam tiga skema yaitu (theguardian.com, 2014):

1. Perbudakan

Broker merekrut beberapa migran Myanmar, Laos, dan Kamboja yang akan dijual untuk bekerja di Thailand dengan melakukan penipuan untuk membantu migran mencari pekerjaan. Jumlah dan harga migran sesuai dengan kesepakatan *broker* dengan *employer*. Migran yang telah direkrut oleh *broker* kemudian dibawa ke beberapa pelabuhan seperti Mahachai, Songkhla, Samae San, Ranong, Rayong, Kantang, Pattani, Pak Nam, dan Samut Prakan. Migran dituntut untuk terus bekerja dan mendapatkan banyak ikan di sekitar Teluk Thailand.

2. Penangkapan

Jenis ikan yang ditangkap oleh migran adalah *trash fish*, tuna, maupun udang. Kapten kapal kemudian menjual *trash fish* secara tidak langsung kepada *CP Foods*. *CP Foods* membeli *fishmeal* melalui 38 pabrik yang telah ditentukan. *Fishmeal* kemudian digiling dan digunakan sebagai makanan untuk udang. Sekitar 45.000 metrik ton *fishmeal* dibeli oleh CP Foods pada tahun 2013.

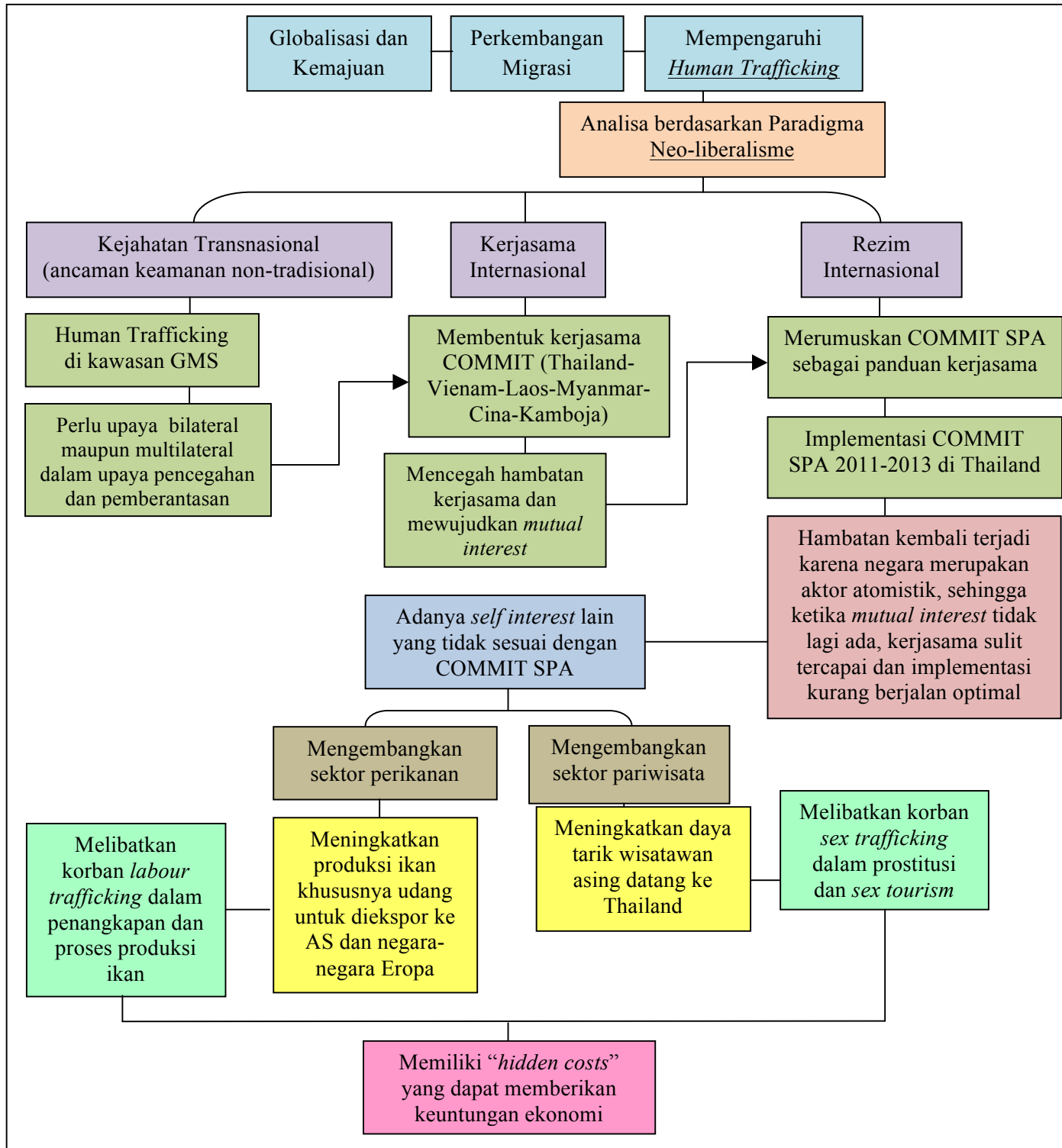
3. Ekspor

⁴ Organisasi NGO terdaftar secara resmi di Inggris dan Wales, menangani perlindungan terhadap lingkungan dan hak asasi manusia dalam lingkup internasional (www.ejfoundation.org).

⁵ “*These facilities remove the heads, veins and hard shell of the shrimp and prepare it for secondary or value-added processing in larger facilities, before export to consumers around the world*” (EJF, 2013: 14).

CP Foods kemudian mengekspor udang ke negara-negara Eropa. Beberapa produk udang diekspor ke *Felixstowe*, kemudian pengemasan produk dilakukan di Soham. Setelah itu, produk dikirim ke beberapa *retailer* di UK. Berdasarkan pembahasan di atas, secara sederhana dapat disimpulkan melalui bagan di bawah ini:

Bagan 2.1
Hasil Penelitian



3. Kesimpulan

Implementasi COMMIT SPA tidak terlepas dari kepentingan bersama negara-negara GMS untuk mencegah dan memberantas *human trafficking*. Akan tetapi, SPA yang dibentuk tidak dapat menjamin Thailand akan selalu bekerjasama dengan *mutual interest*. Meskipun Thailand telah mengimplementasikan berbagai aktivitas dalam rezim COMMIT SPA, *human trafficking* pada periode implementasi 2011-2013 masih mengalami peningkatan. Peningkatan *human trafficking* tidak terlepas dari adanya kepentingan Thailand yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama negara-negara COMMIT yaitu untuk mendapatkan keuntungan khususnya dibidang pariwisata dan perikanan. Ketika kepentingan bersama tidak lagi ada, implementasi rezim tidak dapat berjalan secara optimal.

Dapat disimpulkan bahwa *human trafficking* meningkat pada masa implementasi COMMIT SPA di Thailand periode 2011-2013 disebabkan karena adanya kepentingan Thailand yang tidak sesuai dengan kepentingan bersama negara-negara COMMIT yaitu:

1. Mengembangkan sektor pariwisata:

Keterlibatan korban *sex trafficking* dalam aktivitas prostitusi dan *sex tourism* sebagai salah satu upaya untuk menarik wisatawan asing dan mengembangkan sektor pariwisata. *Sex tourism* dan prostitusi merupakan tindakan ilegal di Thailand. Akan tetapi, kedua aktivitas ini masih beroperasi dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk menarik wisatawan asing dan memberikan “*hidden cost*” bagi Thailand.

2. Mengembangkan sektor perikanan:

Keterlibatan korban *labor trafficking* dalam memproduksi ikan yang diekspor ke AS dan negara-negara Eropa. Meskipun melibatkan korban *human trafficking*, ekspor ikan tersebut masih berjalan dan hal ini akan menambah keuntungan ekonomi bagi Thailand sebagai salah satu negara pengekspor ikan terbesar. Ekspor ikan ke AS dan negara-negara Eropa yang melibatkan korban *human trafficking* memberikan “*hidden cost*” bagi Thailand.

Daftar Pustaka

- Accenture. (2013). *Exploitative Labor Practices in the Global Shrimp Industry*. Prepared for Humanity United
- Ashley, Mason. (2011). Tourism and the Sex Trade in Southeast Asia. *Totem: The University of Western Ontario Journal of Anthropology*. Volume 7, Issue I, article 7. University of Western Ontario
- Brodeur, Abel, N. Lekfuangfu, Warn, and Zylberberg, Yanos. (2014). *Persistent Impacts of Temporary Demand Shocks: How U.S. Servicemen Shaped Thailand's Sex Industry*.
- ECPAT Internasional. (2011). *Global Monitoring Status and Action against Commercial Sexual Exploitation of Children*. Bangkok: ECPAT Internasional
- Ehrlich, Richard S. 24 Oktober 2014. U.N. Report Calls for Decriminalizing Prostitution. *Washington News*. Diakses pada tanggal 29 Januari 2015 dari <http://www.washingtontimes.com/news/2012/oct/24/un-report-calls-decriminalizing-prostitution/#ixzz3QNYJAnqy>
- Environmental Justice Foundation. (2013). *THE HIDDEN COST: Human Rights Abuses in Thailand's Shrimp Industry*. London: EJF
- _____. (2014). *SLAVERY AT SEA: The Continued Plight of Trafficked Migrants in Thailand's Fishing Industry*. London: EJF
- Foundation Scalles. (2011). *Sexual Exploitation: Prostitution and Organized Crime*. Economica: Paris

- Hodal, Kate and Kelly, Chris. 10 June 2014. Trafficked Into Slavery on Thai Trawlers to Catch Food for Prawns. *The Guardian, UK*. Diakses pada tanggal 28 Januari 2015 pukul 09.25 WIB dari <http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/-sp-migrant-workers-new-life-enslaved-thai-fishing>
- Hugoo, Graeme. (2005). Migration in the Asia-Pacific Region. *Paper*. Dipersiapkan untuk program penelitian dan analisis kebijakan Komisi Global untuk Migrasi Internasional: hlm. 1-61.
- International Labour Organization. (2012). *Thailand's Shrimp and Seafood Industry – A World Leader*. ILO
- International Organization for Migration. (2011). *Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities*. Jenewa: IOM
- Larsen, Jacqueline Joudo. (2010). Migration and People Trafficking in Southeast Asia. *Laporan Penelitian*. Australian Institute of Criminology
- Martin, Philip. 17 Januari 2013. Human Trafficking: One Town in Thailand. *WGBH News*. Diakses pada tanggal 25 Februari 2015 pukul 17.05 dari <http://wgbhnews.org/post/human-trafficking-one-town-thailand>
- Office of Anti-Trafficking in Persons Committee. (2011). *2011 Thailand Situation and Progress Report on Prevention and Suppression on Trafficking in Persons in Thailand*. Ministry of Social Development and Human Security
- _____. (2012). *2012 Thailand Situation and Progress Report on Prevention and Suppression on Trafficking in Persons in Thailand*. Ministry of Social Development and Human Security
- _____. (2013). *2013 Thailand Situation and Progress Report on Prevention and Suppression on Trafficking in Persons in Thailand*. Ministry of Social Development and Human Security
- Pholphirul, Piriya. (2012). Immigration, Job Vacancies, and Employment Dynamics: Evidence from Thai Manufacturers. *Journal of Asian Economics*. Volume 24, February 2013, Pages 1–16. School of Development Economics, National Institute of Development Administration Thailand.
- Tanielian, Adam Richard. (2013). Illicit Supply and Demand: Child Sex Exploitation in South East Asia. *NTU Law Review*. 8(1): 97-140, March 30, 2013. Institute of International Studies, Ramkhamhaeng University
- The Asian Forum of Parliamentarians on Populations and Development. *Human Trafficking in Southeast Asia*. AFPPD
- United Nations Development Programme. (2012). *Sex Worker and the Law in Asia and the Pacific*. Bangkok: UNDP
- United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking. (2007). *The COMMIT Sub-Regional Plan of Action (COMMIT SPA): Achievements in Combating Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-Region, 2005-2007*.
- _____. (2011). *UNIAP Phase III – Annual Progress Report (January 2011 to December 2011)*. Bangkok: UNIAP
- _____. (2011). *Estimating Labor Trafficking: A Study of Burmese Migrant Workers in Samut Sakhon, Thailand*. Bangkok: UNIAP
- _____. (2014). *UNIAP Final Report Phase III: 2007-2014*. Bangkok: UNIAP
- Walk Free Foundation. (2013). *The Global Slavery Index 2013. Report*. Walk Free Foundation
- World Travel and Tourism Council. 2013. *Benchmarking Travel & Tourism in Thailand: How does Travel & Tourism compare to other sectors?*. Summary of Findings, November 2013. WTTC
- _____. 2014. *Travel and Tourism Economic Impact 2014: Thailand*. London: WTTC